

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Studi Hubungan Internasional merupakan bagian dari ilmu sosial sebagaimana halnya sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu komunikasi, dan lain sebagainya. Seperti ilmu sosial lainnya, tidak mudah untuk membuat definisi Hubungan Internasional yang dapat diterima secara luas. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya dalam studi Hubungan Internasional terdapat banyak definisi mengenai Hubungan Internasional itu sendiri yang satu sama lain memiliki fokus yang berbeda. Selain itu untuk mendefinisikan Hubungan Internasional dalam beberapa kata pun tidak mudah karena meskipun negara dan interaksinya merupakan fokus utama dalam studi Hubungan Internasional, disiplin ini pun menaruh perhatian pada banyak isu seperti aktivitas aktor-aktor non-negara, keamanan internasional, ekonomi politik internasional, keamanan internasional, lingkungan internasional, terorisme, globalisasi, studi wilayah, dan sebagainya.

Secara sempit, Hubungan Internasional didefinisikan sebagai hubungan antar negara atau hubungan antar bangsa. Seperti yang dikatakan Chris Brown dan Kirsten Ainley, Hubungan Internasional merupakan studi tentang hubungan negara-negara. Hubungan Internasional dapat juga dimaknai sebagai aksi dan reaksi diantara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elite yang berkuasa di

negara-negara tersebut. Joshua Goldstein mengatakan Hubungan Internasional sebagai hubungan antar pemerintah dunia (*International relations are the relationships among the world's governments*). Definisi Hubungan Internasional secara sempit terutama diintrodusir oleh sarjana-sarjana Hubungan Internasional sebelum berakhirnya perang dingin (*cold war*) kebanyakan dari mereka memandang inti dari Hubungan Internasional adalah "Politik Internasional". seperti Norman Padelford dan George Lincoln yang berpendapat bahwa ketika orang-orang membicarakan tentang Hubungan Internasional, mereka berpikir mengenai hubungan antar negara, dan hakikat dalam hubungan antar negara adalah politik internasional. ada juga politik internasional itu sendiri meruokan interaksi mengenai kebijakan negara-negara dalam pola-pola hubungan kekuasaan yang berubah. Dan Hans Morgenthau berpendapat bahwa Hubungan Internasional merupakan perjuangan untuk kekuasaan di antara bangsa-bangsa.

Selain menekankan pada politik internasional, definisi Hubungan Internasional yang dapat diklasifikasikan dalam arti sempit adalah terlalu berorientasi pada negara. di dalam pandangan para sarjana Hubungan Internasional yang menganut pendekatan ini, walaupun Hubungan Internasional berlangsung dalam isu-isu nonpolitik seperti isu keamanan, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan lain sebagainya, namun tetap aktor dari Hubungan Internasional adalah tetap negara. hubungan Internasional tetaplah hubungan antar negara. seperti yang Joyce P. Kaufman katakan, Hubungan Internasional adalah bidang studi yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat didalam sebuah negara yang memiliki implikasi pada hubungan keluar perbatasan negara tersebut.

Ditambahkan juga oleh Stanley Hoffman bahwa Hubungan Internasional dapat mencakup aktivitas-aktivitas yang berbeda seperti sosial, agama, ekonomi, dan lain sebagainya selama aktivitas tersebut memiliki implikasi terhadap hubungan politik internasional. Bagi Hoffman, Hubungan Internasional itu berkaitan dengan semua pertukaran, hubungan, transaksi, informasi, dan respons perilaku yang dihasilkan antara masyarakat dan diantara masyarakat-masyarakat terorganisasi atau negara yang terpisah.

Sebagai implikasi dari perubahan yang terjadi didalam masyarakat dunia, khususnya sebagai perubahan dari revolusioner di bidang teknologi komunikasi dan transportasi, yang telah menjadikan dunia ini seperti *Global village* atau kampung global, dalam “kampung” ini tidak hanya ada negara-negara yang saling berinteraksi, tetapi ada juga aktor-aktor non-negara yang juga saling berinteraksi, akan tetapi aktor non-negara yang disebut dengan *transnational actors*. Intensitas interaksi dan berbagai bentuk transaksi antar aktor transnasional dari waktu ke waktu yang semakin tinggi jika dibandingkan dengan hubungan resmi antar Negara, dan ini semua membuat definisi dari Hubungan Internasional mengalami transformasi. Mayoritas dari sarjana Hubungan Internasional telah menyepakati bahwa Hubungan Internasional tidak identic dengan politik internasional juga tidak terlalu berorientasi kepada negara. Hubungan Internasional bersifat kompleks dan multidimensi.

Keith Shimko mengemukakan, dalam arti luas Hubungan Internasional mencakup keseluruhan yang kompleks mengenai hubungan ekonomi, budaya, politik, militer, hukum, dan sosial dari semua negara dan juga unsur populasi dan

entitas mereka. Stephanie Lawson pun menyatakan bahwa Hubungan internasional merupakan studi tentang hubungan antar negara terlalu sempit dan sederhana. Menurutnya Hubungan Internasional dalam arti luas merupakan interaksi antar aktor berbasis negara yang melintasi batas-batas negara. Semakin meluasnya peran aktor-aktor transnasional, perlu dilakukan modifikasi dan redefinisi Hubungan internasional dikarenakan semakin meningkatnya peran aktor non-negara, institusi internasional, dan kelompok-kelompok sosial. Julie Gilson dan David Armstrong juga menekankan bahwa semakin pentingnya *civil society* dalam tata kelola internasional atau dapat dikatakan meskipun peran negara dalam Hubungan Internasional tetap penting, perhatian terhadap berbagai interaksi yang melibatkan aktor non-negara pun terus meningkat dalam studi Hubungan Internasional di berbagai negara.

Peu Ghosh mengatakan bahwa Hubungan Internasional merupakan sebuah studi tentang masalah-masalah luar negeri dan isu global diantara negara, termasuk peran aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Ola Joseph Toyin memiliki pendapat bahwa Hubungan Internasional merupakan studi tentang segala bentuk interaksi yang terjadi diantara anggota-anggota dari negara atau entitas yang terpisah didalam sistem internasional.

Robert H. Jackson dan Georg Sorensen juga menambahkan, studi Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi dan hubungan antar negara, termasuk kebijakan-kebijakan dan aktivitas pemerintah nasional, organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi internasional, dan perusahaan

multinasional (MNC). definisi Jackson dan Sorensen menyebutkan bahwa studi Hubungan Internasional tidak hanya membahas interaksi dan hubungan antar negara tetapi juga aktor non-negara sebagaimana yang disampaikan juga oleh Grieco, Peu Ghosh, Shiko, dan Take. ada juga Harry Chernotsky dan Heisi Hobbs yang tidak hanya menekankan berbagai aktor yang terlibat didalam dinamika Hubungan Internasional , tapi banyak juga isu yang ditangan oleh studi Hubungan Internasional. mereka pun mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai “*a field of inquiry that examines the broad array of human relationship that involve cross-border interactions*”.

Dengan semakin samarnya batas negara dan kedaulatan sebagai akibat dari globalisasi, istilah Hubungan Internasional tidak dapat lagi diidentikan dengan politik internasional. kemudian Patrick McGowan mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi yang mempelajari tentang tatanan global yang bagaimana tatanan global tersebut muncul, diubah, dan dipelihara didalam sistem global melalui penggunaan otoritas dan power, dan juga mengelola hubungan antar aktor. Hubungan-hubungan tersebut juga mungkin melibatkan negara, dua atau lebih negara ataupun mengecualikan negara atau mungkin melibatkan negara dan aktor yang bukan merupakan negara. definisi ini pun menegaskan bahwa Hubungan Internasional tidak hanya mempelajari hubungan antar negara atau penggunaan otoritas (*power*) yang dilakukan negara saja. Studi Hubungan Internasional merupakan studi tentang sistem global dalam arti luas dan bahkan lebih dari itu dimana sejumlah sarjana menyatakan bahwa globalisasi telah

membuat makna Hubungan Internasional itu sendiri menjadi kabur dan cenderung merupakan terminologi yang abstrak.

Seperti Patricia Owens, John Baylis, dan Steve Smith yang menggunakan terminologi *world politics* daripada Hubungan Internasional ataupun politik internasional. dan bagi mereka istilah Hubungan Internasional lebih mengacu kepada hubungan antar negara, sedangkan realitasnya Hubungan-hubungan antar aktor transnasional didalam masyarakat dunia lebih intensif jika dibandingkan dengan hubungan-hubungan resmi antar pemerintah yang mewakili negara mereka. sarjana Hubungan internasional lainnya yang menggunakan *world politics* diantaranya Pamela Martin dan Richard Collin, Shannon Blanton dan Charles Kegley, Herbert Gibbons dan yang lainnya.

James Lee Ray dan Juliet Kaarbo lebih menggunakan istilah *Global Politics* daripada studi Hubungan Internasional itu sendiri. Karena menurut mereka *Global Politics* lebih menyiratkan latar belakang historis dan teoretis untuk memahami kompleksitas Hubungan Internasional kontemporer. istilah *Global Politics* ini sebagai pengganti terminology studi Hubungan Internasional dan juga digunakan oleh sarjana Hubungan Internasional lainnya seperti Jenny Edkins, Andrew Heywood, Maja Zehfuss, Richard Mansbach dan Kristen Taylor, Steven Lamy dan John Masker (Bakry, 2017).

Hubungan internasional adalah studi mengenai interaksi antar aktor, baik negara maupun non-negara, yang berlangsung di dalam sistem internasional dan hubungan yang dijalin berbentuk hubungan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik, yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi aktor-aktor lainnya

diluar unit politiknya (Johari, 1985). Hubungan Internasional juga dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor didalam politik dunia danmeningkatkan peranan aktor-aktor nonnegara. Batas-batas yang memisahkan bangsa semakin kabur dan tidak relevan. untuk beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan. Dan hingga saat ini ilmu Hubungan Internasional telah mengalami sejumlah perkembangan yang cukup signifikan. Setidaknya ini dapat dilihat dari berkembangnya ruang lingkup kajian dan aktor-aktor di dalam Hubungan Internasional, yang pada awalnya hanya terbatas terhadap kajian keamanan dan negara pun menjadi sangat variatif dengan melibatkan aktor-aktor non-negara dan isu-isu yang beragam, seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

2.1.2 Regionalisme

Menurut Mansbaach, kawasan atau *Region* adalah "Pertemuan teritorial dibedakan dari premis kedekatan geologis, budaya, pertukaran, sdan saling ketergantungan keuangan, komunikasi, dan dukungan yang berguna dalam organisasi di seluruh dunia". (Raymond F. Hopkins dan Richard W. Mansbach: 1973). Sementara itu, menurut Coulumbis dan Wolfe, dalam bukunya yang berjudul *Presentation to Universal Relations, Control and Equity*, ada empat strategi atau kriteria yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi dan menetapkan kawasan atau *Region* yang benar-benar luar biasa diputuskan dengan alasan pemeriksaan. , untuk lebih spesifik kriteria geologis, kriteria masalah legislatif / militer, kriteria keuangan, dan kriteria berbasis nilai. Pertimbangan karakteristik khusus suatu wilayah dapat berupa kerangka topografi, sosiologis,

etnolinguistik, sosial-politik dan keuangan dari suatu daerah tertentu, sehingga mampu mengenali antara bagian-bagian unit kawasan (Reddis, 1997).

T. May Rudy menyatakan bahwa di setiap kawasan ada karakteristik yang tidak biasa. kajian peristiwa mencakup peristiwa berbeda yang terjadi dalam suatu zona atau yang menyangkut suatu negara di suatu wilayah (Rudy, 1997). Yang paling penting dalam pertimbangan regionalisme adalah menyelidiki tingkat kedekatan (level kohesi), struktur dalam mengaktualisasikan bagian atau struktur politik (struktur hubungan) di suatu tempat, dan rasa persekutuan yang menjadi ciri pengembangan wilayah. Partisipasi, kawasan regional lebih menyinggung pada posisi regional topografi, batas-batasnya direalisasikan dan dapat diterjemahkan dengan nyata atau asli, sedangkan regionalisme lebih unik, mengenai "jiwa" dari suatu kawasan.

Namun, karena regionalisme adalah ide yang abstrak dan tidak dapat dijelaskan, sulit untuk mendeteksi keberadaan regionalisme di suatu wilayah di belahan dunia ini. Regionalisme sebagai deskripsi berarti regionalisme sebagai posisi moral, sedangkan regionalisme sebagai resep berarti regionalisme sebagai doktrin atau doktrin tentang bagaimana hubungan internasional harus diatur.

Menurut Andrew Hurrell (1995), ada lima proses berlangsungnya Regionalisme, yaitu regionalisasi, kesadaran dan identitas regional, kerja sama regional antar negara, integrasi regional yang didukung negara, dan kohesi regional.

Beralih ke sejarah terbentuknya regionalisme yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu klasik dan baru, kemunculan regionalism kembali (1990-an) dalam

bidang politik dunia mendapat tanggapan beragam dengan jelas bahwa ada negara-negara yang bereaksi penuh harap (optimis) dan beberapa pesimis. Mereka yang melihat regionalisme dengan optimis sebagai sesuatu yang positif dan menjadi ciritatanan internasional setelah perang dingin yang mana regionalisme berperan sebagai penyeimbang interaksi aktor-aktor dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sementara pihak yang memandang pesimis, regionalisme hanya sebagai tren yang bersifat sementara karena keberadaannya dilandaskan kepada kepentingan sesaat.

Regionalisme klasik adalah regionalisme yang berkembang sekitar tahun 1960-an di samping munculnya organisasi kerjasama regional, yang bersifat *highpolitics* di mana sudut pandang politik mengatur pelaksanaan organisasi. Ketikapembentukan regionalisme yang menjadi titik awalnya adalah yang utama dengan melihat perhitungan kontrol (kohesi) yang membuat negara-negara tertarik oleh partisipasi teritorial, selain dengan melihat kelahiran institusi regional sebagai wujud kerjasama regional suatu kawasan. Menurut Fawcett, dalam Perang Duniaregionalisme belum terlihat dan ini terkait dengan dua variable yang pertama, Perang Dunia II membawa kerusakan yang sangat parah yang hampir dialami oleh semua bangsa di dunia bukan hanya seperti di Eropa.yang kedua , terjadinya transformasi dalam tatanan masyarakat internasional yang pada saat itu bersifat 'Eurosentris' dimana eropa sebagai pusat segalanya.

Dalam perang dingin wilayah menjadi sudut pandang vital, ini terkait dengan persaingan dua negara adidaya AS dan US. Negara-negara di dunia harus selektif untuk mendukung dan berkolusi dengan AS dan US sehingga menurut

salah satu tokoh Fawcett pada masa Perang Dingin dapat diakui, meskipun terlepas dari kenyataan bahwa itu masih dalam bentuk Regionalisme Klasik yang lemah. Regionalisme dapat dilihat dalam konstitusi PBB yang mengakui keberadaan organisasi teritorial yang dapat menyelesaikan konflik atau debat yang terjadi, sebelum masalah ini dibawa ke mahkamah internasional PBB. Munculnya regionalisme klasik terkait dengan dua kondisi, khususnya:

1. Regionalisme muncul dalam versi persiapan piagam PBB yang di buat di Dumbarton Oaks tahun 1944 dan menetapkan bahwa keberadaan badan-badan regional yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan tidak seharusnya dihalang-halangi
2. Keberadaan agen regional merupakan sub-ordinat dari kekuasaan dan pengaruh dua negara adikuasa dan hal ini ditunjukkan dengan munculnya NATO, Pakta Wasarta, Pakta Rio, SEATO, CENTO, dan ANZUS.

Organisasi internasional ini secara politik merupakan salah satu wadah atau sarana *struggle for power* bagi negara lemah, dan setelah bertahan selama 10 tahun regionalisme klasik mengalami kemunduran yang disebabkan oleh bukan kaum regionalis yang mengembangkan Uni Eropa tapi kaum fungsional dan neofungsionalis, munculnya anti-Eurosentris dan bubarnya beberapa organisasi-organisasi regional.

Karena munculnya regionalisme yang berbeda dari tujuan regionalisme klasik serta lebih ambisius dan menjanjikan maka terbentuklah regionalisme baru. Regionalisme yaitu regionalisme yang berkembang pada awal tahun 90-an pasca

perang dingin yang bersifat *low politic*, dan dimana aspek budaya dan ekonomi lebih mendominasi kerjasama antar negara.

Penyebab kemunculan dari regionalisme baru ini didominasi oleh 4 faktor yaitu ketika berakhirnya perang dingin yang membuat pandangan elite terhadap kerjasama internasional dan desentralisasi sistem internasional, perubahan ekonomi, berakhirnya paham dunia ketiga dan demokratisasi. Hal ini memunculkan kritik terhadap regionalisme baru diantaranya *fashionable than desirable* (trend dan keinginan), kemampuan organisasi regional untuk menangani permasalahan regional meragukan dan daya ikat regional ialah mempertajam perbedaan antara *inside/outside* kawasan.

Pembabakan teoretis mengenai regionalisme ini didasarkan pada pemetaan regionalisme dalam tahap analisis (*level of analysis*) studi hubungan internasional. Indikator-indikator yang akan dilihat dalam setiap tahap peringkat analisis, yaitu:

1. Menganalisis karakteristik struktural, hubungan *power*, pola-pola ekonomi, dan norma-norma perilaku dari sistem.
2. Tingkat negara / *organizational* untuk menganalisis tipe pemerintahan seperti situasi, kebijakan, dan budaya politik juga aktor yang membuat kebijakan.
3. Tingkat individu akan melihat individu sebagai *a species*, perilaku di dalam berorganisasi dan karakter kepemimpinannya.

Pandangan teoretis dalam memandang regionalisme digulirkan oleh neorealisme dan interdependensi struktural globalisasi. Level negara, pandangan teoretisnya digulirkan oleh neofungsionalisme, neoliberal intitusionalisme, dan

konstruktivisme yang memusatkan perhatian terhadap pengaruh interdependensi regional. Pada level individu ada teori domestik yang menjelaskan regionalisme kontemporer dilihat dari tiga faktor penting diantaranya regionalisme dan *statereconherence*, serta *convergence theory*, serta tipe Rezim dan demokratisasi.

Teori-teori sistematis menjelaskan pentingnya peran struktur ekonomi dan politik yang lebih luas terhadap suatu kawasan dan pengaruh tekanan-tekanan dari luar terhadap kawasan, hal ini bersifat *out-side-in*. kawasan dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, dua teori sistemik yang pertama yaitu teori dari kaum neo-realis yang menekankan tentang pentingnya sistem internasional yang anarki serta pentingnya persaingan *power* secara politis dan ekonomis. Kedua adalah teori interdependensi dan globalisasi yang menekankan terhadap perubahan ciri dalam sistem internasional dan pengaruh perubahan secara ekonomi dan teknologi.

Regionalisme juga sering kali dianggap sebagai hal yang sangat bertentangan dengan prinsip realisme yang hanya memandang negara (*nation-state*) sebagai satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, dimana negara-negara itu pada dasarnya sangat diharapkan untuk mampu mempertahankan diri dalam kondisi sistem internasional yang anarki sehingga masing-masingnya melakukan *strugglefor power*. tetapi pada kenyataannya negara-negara yang letaknya berdekatan secara geografis saling melakukan kerja sama dan sebisa mungkin menjadi sebuah *good neighbor*.

Untuk neo-realis, hegemoni AS sangatlah penting. Neorealis menganggap integrasi yang dikendalikan langsung oleh desakan dan tekanan AS. dan juga

integrasi Eropa yang pada kenyataannya merupakan integrasi subregional yang ditanamkan dengan kerangka keamanan trans-atlantik. Penerimaan terhadap ketergantungan keamanan pun menjadi salah satu kesepakatan inti di dalam terbentuknya kerja sama dan integrasi Eropa yang merupakan fakta yang membuat pentingnya ketergantungan keamanan dalam hubungan antara isu-isu ekonomi dan keamanan di berbagai belahan dunia lainnya.

Sasaran ekonomi dalam integrasi ekonomi bukan berasal dari keinginan untuk mengejar kesejahteraan melainkan dari hubungan langsung antara kekayaan ekonomi dengan *power* politik dan dari negara-negara fokus terhadap keuntungan dan kerugian relatif. Regionalisme ekonomi kemudian bisa dilihat sebagai strategi persaingan kaum neo-merkantilis.

Dalam studi hubungan internasional istilah hegemoni juga ditujukan kepada negara-negara *super power* yang memiliki kapabilitas lebih untuk berkuasa dan menguasai negara lain. Kebijakan hegemoni inipun mempengaruhi kebijakan negara lain. Terdapat empat cara negara hegemon mendorong regionalisme dan terciptanya insitusi regional, yaitu:

1. Kelompok-kelompok subregional sering berkembang sebagai respon terhadap keberadaan dan kekuasaan hegemon atau yang berpotensi menjadi hegemon.
2. Regionalisme dapat muncul untuk membatasi *free exercise* dari kekuasaan hegemoni dengan pembentukan insitusi-intitusi regional.
3. *Bandwagoning*. Negara-negara lemah terhadap hegemon regional, terjadikerjasama antara negara lemah dengan negara kuat.

4. Negara hegemon berusaha untuk mencari cara terlibat dalam pembentukan intitusi-intitusi regional.

Ada dua konsep tatanan atau sistem internasional pasca perang dingin yaitu *complex interdependence* yang menyangkut interdependensi struktural dan globalisasi sebagai sistem internasional. Ciri utama *complex interdependence* adalah *multiple channels* yaitu menghubungkan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dengan hubungan bersifat *interstate*, transgovernmental atau hubungan antarpemerintah, dan transnational dengan artian hubungan individu atau kelompok yang melintasi batas negaranya.

Berbeda dengan pendekatan *outside-in*, yang memiliki teori yang lebih melihat langsung kepada hubungan antara regionalisme dan interdependensi regional yaitu kesalingtergantungan yang tumbuh di antara aktor-aktor yang berada di suatu kawasan. Terdapat tiga teori yang membahas mengenai interdependensi kawasan, antaralain Neofungsionalis, Neo-liberal institusionalisme dan Konstruktivisme.

Terdapat tiga faktor domestik mengenai regionalisme kontemporer yaitu :

1. regionalisme dan *state coherence* dimana regionalisme dikaitkan *beyond the state* yang artinya kedaulatan suatu negara menjadi berkurang dan batas-batas negara tidak lagi menjadi hal yang penting sehingga regionalisme mengikis peran suatu negara. *Coherence* dan *viability* ini juga sangat terkait dengan legitimasi internal suatu negara. Jika tidak ada negara yang mampu dan memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan integrasi kawasan maka akan sulit terbentuknya suatu kawasan.

2. Tipe Rezim dan Demokratisasi yang teorinya berfokus kepada kebijakan domestik suatu negara dalam melakukan adaptasi sistem internal dengan kawasannya melalui proses demokratisasi.
3. Teori Konvergensi yang memahami dinamika kerja sama regional dan integrasi ekonomi dalam bersatunya berbagai pilihan kebijakan domestic dari negara-negara.

Regionalisme didalam teori ini bukanlah suatu pergerakan tetapi suatu kawasan yang melindungi negara anggota kawasan tersebut. dalam teori ini negara sudah benar-benar menyadari kesesuaian kebijakan domestiknya dengan kawasan.

Pada abad ke 20, telah terjadi pertentangan antara universalisme dan regionalisme. Keduanya setuju dengan sistem internasional, tetapi ada modifikasi dari negara-negara utama terkait dengan penyerahan sebagian kedaulatan negara kepada unit politik yang lebih besar. Kaum regionalis juga sering mengutarakan klaim-klaim yang memperlihatkan superioritas regionalisme terhadap universalisme diantaranya :

1. Terdapat kecenderungan terhadap regionalisme berdasarkan kesamaan didalam hal kepentingan, tradisi, dan nilai-nilai di dalam kelompok-kelompok kecil dari negara yang saling bertetangga.
2. Integrasi politik, sosial dan ekonomi akan lebih mudah dicapai oleh negara-negara dalam jumlah yang sedikit di dalam wilayah geografis yang terbatas dibandingkan secara global.

3. Kerja sama ekonomi regional menjadi wadah perekonomian yang lebih efisien bagi negara-negara, dan entitas regional yang diharapkan dapat berhasil di dalam persaingan pasar dunia secara global.
4. Ancaman-ancaman lokal terhadap perdamaian lebih tepat ditangani oleh pemerintahan di wilayah tersebut daripada oleh negara-negara lain dengan jarak yang jauh.
5. Dengan bergabungnya negara-negara ke dalam kelompok-kelompok regional, maka keseimbangan kekuasaan global akan terpelihara dan mendukung perdamaian dan keamanan dunia.
6. Dunia belum siap mendirikan suatu otoritas global untuk memelihara perdamaian dunia dan mendukung kesejahteraan dunia.
7. Kaum universalis gagal memperhitungkan keberagaman faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan geografis di seluruh dunia yang menghambat kesatuan global.

Namun sebaliknya, kaum universalis sering mengemukakan alasan-alasan berikut yang menunjukkan dominasi universalisme terhadap regionalisme.

Alasan-alasan tersebut diantaranya:

1. Kesalingtergantungan dunia yang telah meningkatkan berbagai permasalahan dan membutuhkan pemecahan secara global.
2. Sumber daya regional tidak cukup untuk memecahkan permasalahan negara-negara di dalam kawasan.

3. Ketika perdamaian tidak dapat ditangani oleh satu organisasi di dunia, ancaman terhadap perdamaian mungkin terjadi jika tidak dicegah tersebut melewati batas-batas regional.
4. Hanya organisasi universal yang bisa mengawasi dominasi negara besar terhadap anggota-anggota didalam suatu tatanan regional.
5. Sanksi terhadap aggressor biasanya tidak terlalu efektif jika diterapkan pada tatanan regional, karena sumber-sumber bantuan dan dukungan terhadap agresor berasal dari luar kawasan.
6. Kawasan bukanlah alat yang tepat dan tetap. Tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai didalam suatu sistem kawasan yang tidak bisa dicapai oleh global.
7. Aliansi-aliansi regional memfasilitasi persaingan dan pertentangan bagi supremasi militer di kawasan-kawasan yang kemungkinan mengarah pada pecahnya peperangan besar.

Adanya sejumlah organisasi universal yang menunjukkan keinginan pemerintah dan rakyat untuk bekerja sama dalam tataran global tanpa perlu menggunakan organisasi regional sebagai tahapan awal dalam mengembangkan konsensus komunitas.

1. Kerja sama fungsional yang mengacu pada area isu terbatas yang disepakati oleh negara-negara untuk bekerja sama dalam isu-isu tertentu.
2. Kerja sama ekonomi mengacu pada tatanan yang diharapkan terciptanya suatu derajat keistimewaan komersial, namun tanpa adanya harmonisasi

dalam aturan domestik maupun obligasi bagi tindakan bersama dalam urusan-urusan internasional.

3. Kerja sama politik, meliputi dukungan dan komitmen bersama yang saling menghargai didalam penerapan nilai dan praktik tertentu dalam suatu negara.
4. Kerja sama dalam masalah luar negeri dan kebijakan keamanan yang berarti para pemerintah secara sistematis saling memberitahu dan berkonsultasi satu sama lain.

Didalam beragamnya bentuk kerja sama regional tidak diperlukan hubungan antara wilayah-wilayah kerjasama ini. Masing-masing kerja samamemiliki konsekuensi status internasional tersendiri. Organisasi regional merupakan suatu bagian dari dunia yang sama terikat oleh kesamaan tujuan berdasarkan ikatan geografis, sosial, politik, ekonomi, budaya dan struktur formal yang memberikan arahan pada berbagai kesepakatan intergovernmental secara formal.

Tingkat kerja sama regional dibagi menjadi empat jenis, yaitu asosiasi, harmonisasi, dan koordinasi integrasi baik sebagian maupun sepenuhnya. Aspek

Legal Personalities :

1. Merupakan himpunan yang bersifat tetap dan dilengkapi dengan struktur organisasi yang lengkap.
2. Memiliki perbedaan didalam hal kewenangan hukum dan tujuan organisasi, antara organisasi tersebut dengan negara anggota.

3. Adanya kewenangan hukum organisasi yang dapat diterima serta diterapkan dalam kegiatan pada ruang lingkup internasional (Sudirman, 2010).

2.1.3 Organisasi

Organisasi Internasional, akan lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005)”.

Ade Maman Suherman mendefinisikan bahwa organisasi internasional Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (Suherman, 2003).

Pada umumnya organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai seluruh atau beberapa tujuan berikut:

- a. Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai.
- b. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan perang atau konflik internasional.

- c. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antar negara demikeuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi dikawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
- d. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal(Coulombis dan Wolfe, 2001).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
- b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
- c. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
- d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
- e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2005).

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untukmelaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama danyang perlu diusahakan secara bersama- sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005).

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-governmental organization/IGO*), yanganggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.

2. Organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental organization/NGO*), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005).

Dalam memahami bentuk atau jenis organisasi internasional, terdapat beberapa klasifikasi organisasi internasional yang diungkapkan oleh Schmitz, Hans Peter, dan Sikkink, Kathryn “International Human Right” yang dikutip oleh Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, menurutnya klasifikasi terhadap organisasi internasional terbagi dalam beberapa kategori, antara lain adalah :

1. Berdasarkan keanggotaan :
 - a. Universal Membership, yaitu organisasi internasional yang memiliki open door policy seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang sesuai dengan bab II, pasal 4 (1) pada Piagam PBB yaitu negara-negara yang mengusung perdamaian dunia untuk menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Limited Membership, yaitu organisasi internasional yang menjadikan sebuah kriteria objektif sebagai dasar dalam membangun batasan atas partisipator yang dapat terlibat dalam sebuah IGO, contohnya Liga Arab (terbatas pada negara-negara berbahasa Arab).
2. Berdasarkan Purpose :
 - a. Multi or General Purpose Organization, yang memiliki kapabilitas untuk menangani lebih dari satu bahkan seluruh isu internasional

(politik, ekonomi, sosial dan keamanan) dalam satu kawasan geografis yang mempengaruhi anggotanya, contohnya Organization of African Unity.

- b. Narrow Mandated IGOs, OI yang deskripsi pekerjaannya terfokus pada satu isu
- c. Internasional tertentu dengan keahlian tinggi dalam menganalisa itu, baik militer, ekonomi, atau sosial, contohnya World Health Organization (WHO) (Carlsnaes, Risse dan Simmons, 2002).

2.1.4 Pembangunan ekonomi

Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi seorang individu, perusahaan, atau masyarakat secara keseluruhannya akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan kepada alternatif-alternatif yang tersedia tersebut, mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik untuk dilaksanakan (Sukirno, 1994).

Dalam ensiklopedi ilmu-ilmu sosial, masalah sentral dalam studi pembangunan ekonomi telah beralih kepada pertanyaan "apa saja wujud dari pembangunan ekonomi di suatu masyarakat?" Selama 20 tahun (sejak 1945) tema yang diutamakan adalah bagaimana memacu pendapatan nasional (indikator utama pembangunan). Hal itu disebabkan adanya keyakinan bahwa jika pembangunan berlangsung, maka berbagai kemajuan ekonomi dan sosial akan

mengikuti. Inti pembangunan dinyatakan menjadi serangkaian proses sebagai berikut:

1. Pangsa investasi dalam belanja nasional akan meningkat, sehingga memperbesar stok modal perindividu yang bekerja.
2. Struktur produksi nasional berubah, menjadi lebih beragam, pangsa industri, sektor utilitas dan jasa akan meningkat dibandingkan dengan pangsa sektor pertanian dan produksi primer lainnya.
3. Sektor perdagangan luar negeri tumbuh, khususnya ekspor manufaktur.
4. Anggaran pemerintah terus membesar karena keterlibatan langsung dalam pembangunan berbagai sarana infrastruktur ekonomi dan sosial.

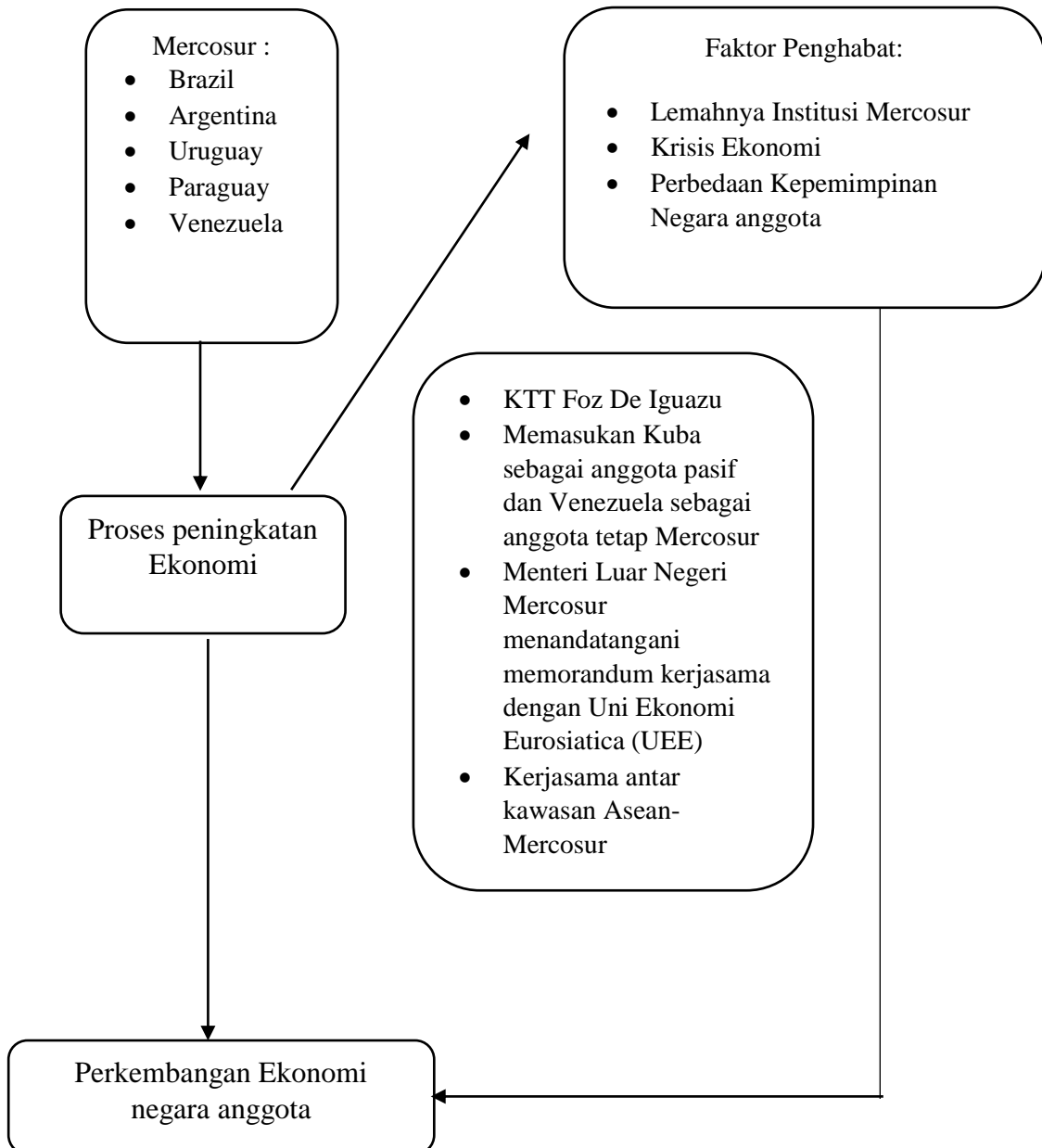
(Kuper, 2003)

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang Negara dan hubungan antar Negara, termasuk peran dari setiap Negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah Internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Istilah Hubungan Internasional memiliki beberapa arti yaitu suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek – aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, Sejarah baru dari politik Internasional, Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam artian tingkah laku manusia yang terjadi atau yang bermula di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain, Suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri (Darmayadi, 2015).

Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. Hubungan internasional mencakup segala hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, studi Hubungan Internasional tidak saja mempelajari tentang bagaimana hubungan antar negara-negara terjalin, tetapi juga mempelajari tentang hubungan antar aktor-aktor nonnegara yang bersifat lintas negara, seperti organisasi internasional, individu dan perusahaan multinasional.

Kerja sama kawasan semakin marak diperbincangkan oleh masyarakat global. Hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain begitu sangat penting. Bentuk kerja sama mulai banyak bermunculan di berbagai belahan dunia untuk menyelaraskan kepentingan negara dalam satu kawasan. Seperti halnya di Amerika Latin telah terbentuk *Mercado Comun Del Sur* (Mercosur) sebagai organisasi regional yang memiliki lima negara anggota yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay dan Venezuela di mana bertujuan untuk memudahkan pergerakan modal, barang dan jasa antar sesama anggota dan sektor perekonomian yang nantinya berdampak pada kesejahteraan regional, memiliki kesamaan kepentingan yaitu untuk memperbaiki kondisi negara-negara anggota di Amerika Latin dengan bentuk integrasi ekonomi, mengupayakan penghapusan hambatan perdagangan seperti beacukai yang tinggi, dan menetapkan *commonexternal tariff*. Integrasi ekonomi adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari terbentuknya Mercosur ini.



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran